KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia
Telepon.3500901; Fax. 3521967

NOTULEN RAPAT TIM PELAKSANA EITI

Hari/Tanggal	: Rabu, 20 Desember 2017
Waktu	: 13.30 – 15.30 WIB
Tempat	Ruang Rapat Utama Lantai 4, Gedung Ali Wardhana, Kemenko Perekonomian, Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
Agenda	: Pembahasan Rencana Kerja EITI 2018
Peserta Rapat Instansi Pemerintah	: 1. Kemenko Perekonomian Kedeputian III: Bastian H, Agus H, Nurwachid P 2. Setjen ESDM: Frieski Putra, Aang Dharmawan 4. Ditjen Migas, Kementerian ESDM: Mirza Aditya 5. Ditjen Pajak, Kemenkeu : Ahmad Zaky Zamani, 6. Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu: Adijanto, Sigit Harjanto 7. Ditjen Anggaran: Kemenkeu: Robby Martaputra, Seprina Hasan 8. SKK Migas: Musfadillah Daulay, Bayu Alfadiyanto
Asosiasi Industri dan Perusahaan	: IMA : Syahrir AB APBI-ICMA : Marvin Gilbert Pertamina : Ahlif NK
Perwakilan Masyarakat Sipil	: PWYP: Aryanto Nugroho
Bank Dunia	: Noriko T, Prasetya, Fia M
Sekretariat EITI	:Edi Effendi, Ronald Tambunan, Agus Trianto, Doni Erlangga, Andrian, Anggi Gartika, Hadian, Novi, Tari

A. PEMBUKAAN

Asisten Deputi Industri Ekstraktif selaku Koordinator Nasional EITI, Bpk Bastian Halim membuka rapat dan kemudian menyampaikan agenda tentang pembahasan rencana kerja EITI tahun 2018. Bpk bastian menyampaikan pada tahun 2018 seluruh kegiatan EITI menggunakan dana dari APBN karena hibah dari

Bank Dunia telah selesai. Bpk Bastian mengharapkan apabila ada bantuan hibah lanjutan dari Bank Dunia. Untuk kegiatan di tahun 2018 Sekretariat EITI akan lebih bersinergi dengan Kedeputian III Kemenko Perekonomian untuk melaksanakan sejumlah kegiatan dan agenda.

B. PEMBAHASAN

1. Presentasi *Team Leader* Sekretariat EITI untuk Rencana Kerja EITI tahun 2018

Disampaikan oleh *Team Leader* Sekretariat EITI, Bpk Edi Tedjakusuma.

- Bpk Edi menyampaikan bahwa anggaran EITI tahun 2018 lebih kecil dari tahun sebelumnya namun diharapkan semua kegiatan dapat dilaksanakan secara maksimal.

- Pada bulan September 2018, Indonesia akan menjalani proses validasi yang kedua, setelah sebelumnya Indonesia divalidasi pada tahun 2013. Hal-hal yang divalidasi terutama menyangkut penyelesaian Laporan EITI dan proses pelaksanaan EITI di Tim Pelaksana EITI.

- Hal lainnya yang harus ditindaklanjuti yaitu tentang Commodity Trading, namun rekan-rekan dari ISC Pertamina belum bisa memutuskan karena harus dibahas di tingkat direksi.

- Dalam pembuatan rencana kerja (*workplan*) seluruh negara harus merumuskan tujuan dan pelaksanaan EITI karena rencana kerja harus sesuai dengan Standar EITI 2016 yang mewajibkan negara pelaksana EITI untuk juga membuka tata kelola industri ekstraktif, sehingga kegiatan EITI menjadi lebih menyeluruh dengan mengikuti rantai nilai (*value chain*) industri.

- Langkah-langkah dalam penyusunan rencana kerja yaitu Identifikasi Prioritas Nasional untuk industri ekstraktif, idefinisi tujuan pelaksanaan EITI, identifikasi kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan, Menyepakati dan mempublikasikan workplan, dan Monitoring dan evaluasi

- Pelaksanaan EITI terkait RPJMN 2015-2019 yaitu Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Mendukung kedaulatan energi, Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, dan Memperkuat tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi. Dalam pencegahan korupsi , EITI adalah bagian dari Stranas PPK (Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi) bersama Bappenas, KPK, KSP dll

- Tujuan pelaksanaan EITI yaitu: Mempromosikan transparansi tata kelola industri ekstraktif, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan industri ekstraktif, Mendorong upaya reformasi tata kelola industri ekstraktif, Membantu upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan negara dari industri ekstraktif, Membantu pencegahan korupsi dengan transparansi

- Permasalahan diantaranya yaitu kesadaran *stakeholder* pada pentingnya transparansi, pandangan bahwa data SDA adalah tertutup, budaya masyarakat yang pasif, masih ada regulasi yang menghambat transparansi, tak ada sanksi dalam pelaksanaan EITI seperti dalam penyelesaian laporan EITI 2015 masih banyak perusahaan yang tak memberikan laporan.

- Program kerja EITI yaitu pengembangan database EITI karena data penting untuk untuk analisis data dan informasi. Pembuatan kebijakan harus berdasarkan data. Program kerja lainnya yaitu penyusunan Laporan EITI, melaksanakan sosialisasi, komunikasi dan diskusi publik, mengembangkan mekanisme revisi tata kelola, peningkatan kapasitas SDM

- Detail rencana kerja (selengkapnya dapat dilihat di rencana kerja). Penyelesaian scoping study untuk Laporan EITI 2016 direncanakan pada bulan maret 2018 dan menekankan pada analisis. Sehingga laporan EITI 2016 akan lebih baik hasilnya.
- Untuk kegiatan komunilkasi akan dilakukan sosialisasi ke daerah dengan tim yang kecil. Setelah beberapa kali sosialisasi dan diskusi tentang EITI daerah, nantinya diharapkan akan dilaksanakan workshop nasional tentang EITI daerah. Untuk perbaikan regulasi akan ditindaklanjuti upaya revisi Perpres 26/2010 dan identifikasi regulasi terkait industri ekstraktif. Untuk *Beneficial Ownership* kajian yang dilakukan KPK masih belum *update*, Kemenkumham sudah memiliki registry BO. Namun belum bisa ditentukan *data assurance*. EITI akan coba mengecek kebenaran data dan tentu saja harus berkoordinasi dengan K/L lain. EITI akan melaksanakan agenda pemberian penghargaan EITI yang diharapkan dalam 2-3 bulan kedepan. Permenko akan dijadikan untuk dasar hukum. Diharapkan dapat dilaksanakan bulan Maret 2018 dan berbarengan dengan launching. Untuk pengembangan database, Bank Dunia memberikan bantuan untuk mengembangkan data dan analisis.
- Diperlukan adanya manajemen pengelolaan pertambangan terutama untuk yang berkontribusi besar bagi negara, karena dari 10.000 perusahaan yang besar hanya sekitar 120 yang mencakup 90 persen penerimaan negara dari industri ekstraktif.

Tanggapan:

- Bpk Bastian menyampaikan bahwa salah satu permasalahan ada di anggaran karena untuk kegiatan EITI sudah dikurangi untuk laporan dan gaji. Jadi harus ditentukan apa yang harus menjadi prioritas

- Bpk Edi: Laporan EITI pasti dikerjakan, sosialisasi yang sudah dilakukan tiap tahun harus lebih diefektifkan. Diskusi-diskusi akan dilaksanakan lagi seperti diskusi tentang DBH dan UU 23/2014. Pernah dilakukan diskusi, namun saat itu perwakilan Kemendagri tak hadir.
- Bpk Bastian : Kegiatan apa saja yang menjadi prioritas. Sepertinya di tahun 2018 yang menjadi prioritas adalah kegiatan apa saja yang mendukung penyelesaian Laoran EITI dan pelaksanaan validasi. Hal-hal lainnya diperlukan tapi kurang menjadi prioritas kecuali misalkan ada bantuan penambahan anggaran.
- Ibu Noriko (Bank dunia): Tahun 2017 support dari bank Dunia sudah selesai dan 2018 semua anggaran dari APBN. Beberapa bantuan yang masih bisa dilakukan Bank Dunia yaitu dengan kajian untuk mendorong data pelapor dan mengidentifikasi data2 di kementerian yang dapat dimanfaatkan oleh EITI. Bank Dunia sudah tak support EITI untuk anggaran, namun masih bisa membantu untuk mendorong sistem pengumpulan data agar *Independent Administor* (IA) lebih fokus pada penyelesaian Laporan EITI.

- Bpk Edi: Bagus apabila dapat meningkatkan pengumpulan data, namun kami ingin meningkatkan porsi analisis di laporan. Seharusnya penyelesaian Laporan EITI di tahun 2018, 2 tahun yaitu tahun 2016 dan 2017 namun anggaran kurang sehingga 1 tahun saja.

- Bpk Aryanto (PWYP) : Sulit apabila banyak agenda walaupun sangat baik apabila laporan di tahun 2018 mencakup 2 tahun (2016 dan 2017). Namun yang perlu diperhatikan adalah apa tindak lanjut dari pelaksanaan EITI di tahun sebelumnya. Atau bergabung dengan kementerian lain dalam membuat kegiatan yang sama, agar lebih efektif secara pembiayaan dan meningkatkan kepemilikan EITI di banyak instansi. Namun harus diidentifikasi Kementerian mana saja, misalkan Kementerian ESDM . Bpk Bastian menyampaikan bahwa akan tidak enak kalau dibiayai pihak lain, namun masih perlu dibahas lagi.
- Bpk Syahrir (Indonesian Mining Association (IMA)): Dari identifikasi permasalahan yang dipresentasikan, tidak ditemukan program kerja untuk hadapi masalah tersebut. Untuk perbaikan

regulasi, hanya revisi Perpres yang dilihat. Padahal banyak permasalahan dengan tata kelola industri ekstraktif. Jadi kegiatan tak hanya sosialisasi, penyelesaian laporan dll. Bpk Bastian menyampaikan bahwa EITI akan lebih dilibatkan dalam berbagai hal termasuk di agenda Kemenko Perekonomian karena EITI adalah lengkap dari gabungan CSO, pemerintah, dan asosiasi. Sekretariat EITI sudah sering dilibatkan dalam kegiatan di Kemenko Perekonomian, misalkan dalam revisi regulasi.

- Bpk Syahrir: Bagaimana awareness Kemenko Perekonomian terhadap EITI?Bpk Bastian: Bpk Sesmenko sebelumnya sangat mendukung, untuk Bpk Sesmenko yang baru mudah-mudahan tetap mendukung.
- Bpk Aryanto menyetujui usulan Bpk Syahrir. Jadi tiap *stakeholder* dapat mengemukaan satu permasalahan. Sehingga dapat diketahui apa yang harus diperbaiki.
- Bpk Adijanto (Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu): EITI yang dikoordinasi oleh Kemenko Perekonomian bukan untuk perbaikan regulasi karena kewenangan regulasi di K/L terkait. Tahub 2018 lebih baik fokus di laporan dan validasi dulu. Lebih baik mengejar agar jarak laporan 1 tahun dari tahun berjalan.
- Bpk Edi: Secara proses mengejar jarak 1 tahun bisa, namun anggaran yang tak tersedia. Untuk analisis lebih baik fokus di perusahaan besar daripada 10.000 perusahaan kecil karena perusahaan yang besarlah yang memberikan kontribusi besar kepada negara.
- Bpk Bastian: *Awareness* Tim Pelaksana EITI tergantung bapak-ibu anggota Tim Pelaksana EITI. Kita ingin memperluas cakupan EITI terutama di provinsi. Partisipasi perusahaan juga ingin kita dorong dengan meningkatkan *awareness* Pemda. Kalau di Kementerian, kita sangat tergantung dengan anggota Tim Pelaksana EITI.
- Bpk Edi: Untuk sanksi kepada perusahaan susah dilakukan sehingga EITI akan memberikan penghargaan kepada perusahaan yang transparan. Hal ini diharapkan dapat merangsang partisipasi perusahaan untuk memberikan laporan. EITI juga ingin mencoba meningkatkan database dan apabila tak ada biaya konsultan, internal Sekretariat EITI dapat menganalisis sendiri.
- Bpk Adijanto: Fungsi EITI sebagai forum komunikasi diharapkan dapat lebih membawa manfaat.
- Bpk Syahrir: Sekali-kali anggota Tim Pelaksana EITI bisa dipanggil, misalkan dengan SK dapat diberikan wejangan oleh Tim pengarah. Kalau bisa ada *selected person* dari Tim Pelaksana EITI misalkan 4 atau 5 orang untuk membantu pelaksanaan EITI oleh Tim Pelaksana. Untuk Laporan EITI, perusahaan tak pernah memberikan laporan ke asosiasi, mereka langsung lapor ke ESDM yang tak aktif hadir di rapat EITI.
- Bpk Edi: Dulu kita melakukanb *strategic retreat* dan hasilnya kurang memuaskan.
- Bpk Aryanto: Lebih baik dilakukan audiensi ke menteri
- Bpk Bastian : Nati akan ditindaklanjuti di pembahasan berikutnya

C. PENUTUP

Bpk Bastian menutup rapat dengan menyampaikan agar semua keputusan rapat agar ditindaklanjuti.

D. HASIL KESEPAKATAN RAPAT

1. Tim Pelaksana EITI menyetujui *workplan* (rencana kerja) EITI 2018
2. Agenda yang menjadi prioritas di tahun 2018 adalah penyelesaian Laporan EITI 2016 dan pelaksanaan validasi EITI
3. Selain agenda prioritas tersebut, agenda-agenda lain harus dilaksanakan secara maksimal walaupun anggaran terbatas.